



LELI YULIFAR

## Purwakarta: Dari Ibukota Kabupaten Karawang Menjadi Kabupaten Mandiri

**RESUME:** Sejarah merupakan proses yang berkesinambungan dengan seluruh dinamikanya, yang memperlihatkan hubungan kausalitas antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Peristiwa demi peristiwa telah membentuk sebuah struktur dalam sejarah yang ajeg dan tetap. Dalam konteks ini, Kabupaten Purwakarta pernah memiliki status rangkap ketika menjadi ibukota Kabupaten Karawang, yakni sebagai "Distrik, Onderdistrik, Afdeeling, dan Kontrole Afdeeling". Perkembangan demografi, pembangunan infrastruktur, dan perubahan wilayah administratif menjadikan wilayah Purwakarta sangat dinamis, yang ditandai dengan berdirinya Kabupaten Purwakarta secara mandiri. Artikel ini mengkaji tentang sejarah Kota Purwakarta, dari sejak awal berdiri pada zaman kolonial Belanda (1816-1942), zaman pendudukan tentara Jepang (1942-1945), zaman revolusi Indonesia (1945-1950), hingga perkembangannya terkini. Dengan menggunakan metode historis, yang terdiri atas heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi, artikel ini menunjukkan bahwa Purwakarta dibangun dengan pola kota tradisional, yang ditandai dengan berdirinya Pendopo dan Masjid Agung. Untuk keperluan air, dibangun Situ Buleud, yang ditengahnya didirikan "babancong", yakni sebuah bangunan mirip gazebo. Di samping itu, terdapat juga "Bumi Ageung", yang menjadi tempat tinggal keluarga Bupati pada saat Pendopo dibangun. Saat ini, tinggalan sejarah tersebut menjadi kebanggaan masyarakat, sekaligus sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Purwakarta.

**KATA KUNCI:** Ibukota Kabupaten Karawang; Kabupaten Purwakarta; Pola Kota Tradisional; Perubahan Sosial; Peninggalan Sejarah.

**ABSTRACT:** "Purwakarta: From the Capital City of Karawang Regency Becomes Regency Independently". History is a continuous process with all its dynamics, showing a causal relationship between an event with other events. The events have formed a structure in the history of a steady and fixed. In this context, Purwakarta Regency has had double status as the capital city of Karawang Regency, namely "District, Onderdistrict, Afdeeling, and Kontrole Afdeeling". The developments of demography and infrastructure, and also changes of administrative region make this Purwakarta region highly dynamic. It is signed by the establishment of Purwakarta Regency independently. This article examines the history of the city of Purwakarta, from the beginning up to the Dutch colonial era (1816-1942), the time of Japanese occupation (1942-1945), the time of the Indonesian revolution (1945-1950), up to the latest development. By using the historical method, which consists of heuristics, criticism, interpretation, and historiography, this article shows that Purwakarta was built by traditional city pattern, signed by the establishment of "Pendopo" (Regent Palace) and Grand Mosque. Water requirements fulfilled by the establishment of "Situ Buleud" (Oval Lake), where in the middle of it was built "babancong", a building like gazebo. Near to "Situ Buleud", there is "Bumi Ageung" (Big House), where the Regent family live when the time of "Pendopo" was being built. For the moment, those historical heritages become a local pride as well as the administrative center of Purwakarta Regency.

**KEY WORD:** Capital City of Karawang Regency, Purwakarta Regency; Traditional City Pattern; Social Change; Historical Heritages.

**About the Author:** Dr. Leli Yulifar adalah Dosen Senior di Departemen Pendidikan Sejarah FPIPS UPI (Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia), Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia. Untuk kepentingan akademis, penulis bisa dihubungi dengan alamat emel: [leli\\_yulifar@upi.edu](mailto:leli_yulifar@upi.edu) dan [lely\\_yulifar@yahoo.com](mailto:lely_yulifar@yahoo.com)

**How to cite this article?** Yulifar, Leli. (2016). "Purwakarta: Dari Ibukota Kabupaten Karawang Menjadi Kabupaten Mandiri" in *SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan*, Vol.9(2) November, pp.213-220. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press and UPI Bandung, ISSN 1979-0112.

**Chronicle of the article:** Accepted (October 9, 2016); Revised (November 10, 2016); and Published (November 30, 2016).

## PENDAHULUAN

Purwakarta, dari sisi efisiologi dan terminologi bahasa, terdiri dari dua suku kata: *purwa* dan *karta*. *Purwa* artinya kita kembali, atau kita mengurai; dan *karta* artinya makmur, maju, dan berkembang.<sup>1</sup> Sementara itu, dalam kaidah bahasa Sansekerta, *purwa* itu adalah *wiwitan*, yang dimaknai sebagai “kembali” masyarakat Purwakarta kepada azas dan dasar masyarakat Jawa Barat, dengan spirit kepemimpinan Siliwangi, yakni: *Silih Asah*, *Silih Asih*, dan *Silih Asuh* (Anwar ed., 2015:117).

Pemaknaan tersebut, dalam konteks kekinian dan kedisinian, kemudian digunakan oleh Bupati Purwakarta yang fenomenal, yakni Dedi Mulyadi, untuk membangun masyarakatnya berdasar kepada budaya Sunda, yang menjadi dasar kebijakannya di dalam memimpin Kabupaten Purwakarta, yang secara historis tercatat sebagai ibu kota Kabupaten Karawang (Anwar ed., 2015).

Potret masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Purwakarta, dewasa ini, tidak terlepas dari perjalanan sejarahnya yang cukup panjang (Bratakusumah, 1986; dan Hardjasaputra ed., 2008). Sebagai kabupaten yang sedang giat membangun adalah penting untuk memahami perkembangan Purwakarta secara sosio-historis, agar seluruh potensi kesejarahan dan nilai budayanya tersebut dijadikan sebagai dasar kebijakan dari para pemangku kepentingan dalam membangun Kabupaten Purwakarta, yang berdiri sejak tahun 1950 tersebut.

Sejarah merupakan proses yang berkesinambungan dengan seluruh dinamikanya, yang memperlihatkan hubungan kausalitas antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya. Peristiwa demi peristiwa telah membentuk sebuah struktur dalam sejarah yang ajeg dan tetap (Kuntowijoyo, 2009). Oleh karena itu, membicarakan sejarah Kabupaten Purwakarta harus bertolak dari berdirinya kota Purwakarta, karena kota Purwakarta lebih dahulu berdiri daripada Kabupaten

Purwakarta. Dengan demikian, Purwakarta memiliki perjalanan sejarah yang sangat panjang, meliputi zaman Hindia Belanda (1816-1942), zaman penjajahan Jepang (1942-1945), dan zaman kemerdekaan Indonesia (1945-1950), yang diawali oleh proklamasi kemerdekaan dan revolusi Indonesia. Pada setiap zaman, terjadi peristiwa-peristiwa penting yang meninggalkan jejak berupa bangunan dan tempat-tempat bersejarah bukan bangunan (Hardjasaputra ed., 2004; dan Hardjasaputra, 2005).

Tulisan ini, dengan menggunakan metode historis, yang terdiri atas: *heuristik*, kritik, analisis, dan historiografi (cf Walsh, 1970; Kuntowijoyo, 2001; dan Sjamsuddin, 2007), berusaha untuk membahas beberapa peristiwa penting disertai maknanya, dengan uraian bersifat garis besar. Perlu dikemukakan pula bahwa peristiwa-peristiwa sejarah pada zaman penjajahan Jepang di Purwakarta belum banyak terungkap. Oleh karena itu, bagian dari tulisan ini dibahas juga kondisi Purwakarta sebagai Kota Kabupaten Karawang pada masa pendudukan Jepang (1942-1945).

## BERDIRINYA KOTA PURWAKARTA

Kota Purwakarta didirikan atas prakarsa Bupati Karawang ke-10, yaitu R.A.A. (Raden Adipati Aria) Suriawinata, yang juga dikenal dengan sebutan *Dalem Solawat* (1829-1854), setelah ibukota kabupaten itu pindah dari Udug-udug ke Wanayasa (Sumantapura, 1999 dan 2002). Berdirinya Kota Purwakarta diresmikan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, J. van den Bosch, dengan *besluit*,<sup>2</sup> atau surat keputusan, nomor 2, tertanggal 20 Juli 1831. Dengan demikian, Udug-udug dan Wanayasa merupakan tempat-tempat bersejarah, yang bisa jadi telah terlupakan oleh generasi berikutnya. Lihat peta 1.

Dalam membangun Purwakarta, dengan pola kota tradisional, infrastruktur utama yang dibangun adalah *alun-alun*. Di sebelah selatan alun-alun dibangun *pendopo*; dan di sebelah barat, dibangun *masjid agung*. Pada

<sup>1</sup>Lihat, misalnya, makna “Karta” dalam online di: <https://id.wikipedia.org/wiki/-karta> [diakses di Bandung, Indonesia: 25 Agustus 2016].

<sup>2</sup>*Besluit* atau surat keputusan tersebut ditemukan oleh Prof. Dr. Sobana Hardjasaputra, M.A. di ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia) di Jakarta. Wawancara dengan Sobana Hardjasaputra (3/7/2015).

tahap awal, pengelolaan *masjid agung*, sebagai sarana ibadah, dipimpin oleh ulama Baing Yusuf (Hardjasaputra, 2005).

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aspek pengairan, dibangun *Situ Buleud*, yang di tengahnya didirikan *babancong*,<sup>3</sup> atau sebuah bangunan yang mirip dengan *gazebo*. *Situ Buleud*, yang bermakna danau (berbentuk) bulat, tersebut sampai saat ini menjadi kebanggaan masyarakat Purwakarta. Selama *pendopo* sedang dibangun, Bupati R.A.A. Suriawinata, beserta keluarga, tinggal di sebuah rumah yang dijuluki oleh masyarakat sebagai *Bumi Ageung* (Hardjasaputra ed., 2004; dan Hardjasaputra, 2005). Lihat gambar 1 dan gambar 2.

### POTENSI SOSIO-HISTORIS DAN MAKNANYA

Berdirinya kota Purwakarta merupakan tonggak sejarah Purwakarta. Dalam perjalanan sejarahnya, Purwakarta berkembang dari kota tradisional menjadi kota relatif modern, baik dalam pemerintahan dan aspek fisik maupun dalam kehidupan sosial (Bratakusumah, 1986; Ilyas, 1987; dan Hardjasaputra ed., 2008). Dalam bidang pemerintahan, status Purwakarta meningkat dari ibukota Kabupaten Karawang menjadi kabupaten mandiri, yakni Kabupaten Purwakarta.

Ketika berstatus sebagai ibukota Kabupaten Karawang, Purwakarta memiliki status rangkap. Kota itu juga



Peta 1:  
Lokasi Udug-udug



Gambar 1:  
*Situ Buleud*, Kondisi Tahun 1920-an



Gambar 2:  
*Bumi Ageung*, Kondisi Sekarang

<sup>3</sup>*Babancong* itu sudah hilang sejak lama. Wawancara dengan Sobana Hardjasaputra (3/7/2015).

berstatus sebagai *distrik, onderdistrik, afdeeling*, dan *kontrole afdeeling* (Kern, 1898; Bratakusumah, 1986; Ilyas, 1987; dan Hardjasaputra ed., 2008). Sejalan dengan kondisi itu, penduduknya pun berkembang, dari bersifat homogen (hanya penduduk pribumi) menjadi heterogin dengan adanya penduduk etnis Cina dan Arab. Dengan demikian, terjadi akulturasi budaya dengan kehadiran multi etnis tersebut (*cf* Mashudi & Djajasoempena, 1970; Padilla, 1980; dan Santoso & Winingsih, 2013).

Pada saat yang bersamaan, pembangunan infrastruktur juga bertambah dengan beberapa sarana/fasilitas, baik untuk kepentingan pemerintah kabupaten dan masyarakat maupun untuk kepentingan pihak kolonial. Untuk kepentingan pejabat kolonial, maka dibangun Gedung Keresidenan atau *Gedong Gedé*, karena Residen Karawang kedudukannya pindah ke Purwakarta (Bratakusumah, 1986; Ilyas, 1987; dan Hardjasaputra ed., 2008).

Perkembangan kehidupan penduduk tidak lepas dari peranan Bupati sebagai kepala daerah, sekaligus sebagai pemimpin tradisional. Misalnya, Bupati R.A.A. (Raden Adipati Aria) Sastra Adiningrat, Bupati Karawang ke-13 (1863-1886), memajukan kehidupan rakyat melalui pertanian. Atas keberhasilannya, Bupati mendapat penghargaan dari pemerintah kolonial Belanda berupa bintang *Ridder in de Orde van den Nederlandsche Leeuw*, sehingga ia dijuluki *Dalem Bintang* (Hardjasaputra, 2007:4).

Faktor lain yang mendorong kesejahteraan penduduk pribumi relatif baik, khususnya petani, adalah dampak positif dari penanaman wajib kopi dalam Sistem Priangan atau *Preangerstelsel*. Sampai dengan tahun 1891, di Distrik Wanayasa dan Gandasoli *Afdeeling* Purwakarta, terdapat 236 kebun kopi. Di Cikao dibangun gudang kopi. Penanaman kopi mendorong kesejahteraan petani, karena produksi kopi dari petani dibeli oleh pemerintah kolonial Belanda dengan harga lebih tinggi dari harga padi dalam bobot yang sama, pada waktu bersamaan.<sup>4</sup>

<sup>4</sup>Contoh, pada tahun 1859, produksi kopi dari petani dibeli oleh pemerintah kolonial Belanda dengan harga f 8.40 (delapan gulden empat puluh sen) per *pikul* atau 62 kilogram.

Mulai akhir tahun 1902, Purwakarta dilewati oleh transportasi kereta api jalur Batavia (sekarang Jakarta) – Bandung. Di kota Purwakarta dibangun stasiun KA (Kereta Api). Dengan demikian, sejak tahun tersebut, Purwakarta makin terbuka terhadap daerah luar. Mobilitas sosial meningkat dan terjadi perdagangan antar daerah. Oleh karena itu, sektor ekonomi riil dipastikan semakin menguat (*cf* Ilyas, 1987; Sumantapura, 1999; Prastowo *et al.*, 2014).

Transportasi KA yang melewati Purwakarta mendorong bertambahnya fasilitas kota, antara lain jaringan listrik pada tahun 1908; Pasar Rebo yang berdiri tahun 1911; Rumah Sakit Bayu Asih yang dibangun tahun 1925; dan Hotel *Spoorzicht* yang juga dibangun pada tahun 1925. Di belakang stasiun KA dibangun dua buah bangunan permanen yang disebut *Gedong Kembar* (Hardjasaputra ed., 2008). Pada paruh kedua tahun 1920-an, didirikan berbagi jenis sekolah, yaitu HIS (*Hollandsch Inlandsche School*), ELS (*Europesche Lagere School*), *Schakelschool* (Sekolah Peralihan), *Normalschool* (Sekolah Guru), dan *Meisjeskopschool* (Sekolah Kejuruan Wanita). Keberadaan fasilitas tersebut menyebabkan interaksi sosial pun meningkat (Kutoyo ed., 1986).

Transportasi KA yang melewati Purwakarta juga menyebabkan Purwakarta menjadi salah satu destinasi wisata, khususnya bagi orang-orang Eropa yang tinggal di Batavia. Salah satu objek wisatanya adalah *Situ Buleud* atau Danau Bundar (Hardjasaputra ed., 2008:11). Dengan berkembangnya pembangunan di daerah ini, maka kehidupan sosial-ekonomi masyarakat Purwakarta dan sekitarnya menjadi meningkat (Bratakusumah, 1986; Ilyas, 1987; dan Hardjasaputra ed., 2008).

Sementara itu, wilayah Purwakarta bertambah luas. Pada perempat pertama abad ke-20, Purwakarta dan Subang masing-masing menjadi *Kontrol Afdeeling*, bagian dari *Afdeeling* Karawang. Di lingkungan *Distrik* Purwakarta terjadi pemekaran Desa.

Waktu itu di Purwakarta/Karawang, harga padi per *pikul* atau 62 kilogram dengan kualitas baik, yakni f 2.40; dan kualitas sedang, yakni f 1.90. Selanjutnya, lihat R.A. Kern (1898); dan A. Sobana Hardjasaputra ed. (2008).

Tahun 1929, misalnya, *Distrik* Purwakarta terdiri atas 3 *Onderdistrik*, yang mencakup 68 Desa, yaitu: *Onderdistrik* Purwakarta yang mencakup 30 Desa; *Onderdistrik* Plered yang mencakup 21 Desa; dan *Onderdistrik* Wanayasa yang mencakup 17 Desa (Bratakusumah, 1986; Ilyas, 1987; dan Hardjasaputra ed., 2008).

Perluasan wilayah terjadi, antara lain, karena jumlah penduduk meningkat dan makin heterogen, yang terdiri atas Pribumi (Sunda dan Jawa), Eropa/Belanda, Cina, dan Arab. Tahun 1929, penduduk *Distrik* Purwakarta berjumlah 129,877 orang, termasuk 300 orang Eropa (Bratakusumah, 1986; Ilyas, 1987; dan Hardjasaputra ed., 2008).

Pada tahun 1929, juga di Kota Purwakarta berdiri perkumpulan *Gending Karesmen*, yang dipimpin oleh R. (Raden) Supyan Iskandar. Perkumpulan itu mementaskan *Gending Karesmen* dengan lakon "Panji Wulung". Para pemainnya adalah siswa *Normalschool*. Hal itu menunjukkan adanya kegiatan budaya, khususnya kesenian tradisional yang semakin berkembang (Sewaka, 1955). Oleh karena mendapatkan ruang untuk berkembang, masyarakat Purwakarta memiliki kesempatan untuk melakukan kreativitas dan mengembangkan beberapa inovasi pada kesenian tradisionalnya.

Memasuki tahun 1942, situasi politik di Jawa Barat menjadi "panas", akibat pasukan Jepang menyerbu Jawa Barat. Tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang yang mendarat di Eretan (pantai utara Indramayu, dekat Cirebon) bergerak ke pedalaman Jawa Barat dan berhasil menduduki Subang, berikut lapangan terbang Kalijati, dan menguasai Purwakarta. Kantor Residen direbut dan dijadikan *Honbu Kempetai* (Markas Polisi Jepang). Hal itu mengandung arti bahwa Purwakarta memiliki kedudukan penting bagi strategi tentara Jepang. Gerak cepat serta taktik dan strategi pasukan Jepang menyebabkan pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang, pada tanggal 8 Maret 1942. Sejak itu, Nusantara berada pada zaman penjajahan Jepang, mulai awal 1942 hingga pertengahan 1945 (Nasution, 1978; Hardjasaputra, 1980; Suwirta, 1989;

dan Pemprov Jabar, 1993:15).

Pada bulan Agustus 1942, keluar Undang-Undang Nomor 27 dan 28, yang menjadikan daerah Jawa dan Madura terbagi ke dalam wilayah administratif berstruktur militer, yang terdiri dari *Gunsyireikan* yang membawahi *Syucokan* (Residen) dan dua *Kotico* (Kepala Daerah Istimewa). *Syucokan* membawahi *Syico* (Walikota) dan *Kenco* (Bupati). Berikutnya, pejabat di bawah Bupati adalah *Gunco* (Wedana), *Sonco* (Camat), dan *Kuco* (Kepala Desa). Jabatan *Kenco* diduduki oleh orang pribumi, sedangkan Asisten Residen, *Controleur*, dan status *Afdeeling* dihapuskan (cf Benda, 1980; dan Hardjasaputra, 1997).

Saat itu, Karawang *Syji/Ken* dimasukkan ke dalam wilayah Jakarta *Syu*. Sementara Purwakarta mendapat sebutan *Ken* (Ibu Kota), yang merangkap Kewedanaan (*Distrik* atau *Gun*), yang terdiri atas tiga *Son*, yakni Purwakarta *Son* (mencakup 30 *Ku*), Plered *Son* (mencakup 21 *Ku*), dan Wanayasa *Son* (mencakup 17 *Ku*). Saat itu Karawang *Ken* dipimpin oleh *Kenco* R.A.A. (Raden Adipati Aria) Suriamiharja, yang kemudian digantikan oleh R.T. (Raden Tumenggung) Pandu Suriadiningrat. Dengan demikian, kedudukan Purwakarta pada zaman pendudukan Jepang (1942-1945) adalah bagian dari Kabupaten Karawang, sekaligus menjadi ibu kota Kabupaten Karawang (Natanagara & Prawiradinata, t.th.; dan Kasupardi & Sudrajat, 2014:143).

Pemerintahan militer Jepang di Purwakarta ditandai dengan pembentukan pasukan PETA (Pembela Tanah Air) di daerah Karawang, dengan Purwakarta dan Cikampek sebagai lokus pelatihan pasukan yang sejatinya ditujukan untuk membantu pasukan Jepang di medan perang, dengan dalih sebagai pasukan Pembela Tanah Air. Sementara itu, untuk menggantikan PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat), yang dianggap oleh pemerintahan militer Jepang terlalu bersifat nasionalis, maka didirikan Jawa *Hookookai*. Pembentukan Jawa *Hookookai* di daerah Karawang dilakukan di Pendopo Kabupaten di Kota Purwakarta (Natanagara & Prawiradinata, t.th.; Hardjasaputra, 1997; dan Kasupardi &

Sudrajat, 2014).

Berikutnya, menyusul berdiri berbagai organisasi yang militeristik, seperti Barisan Pelopor, Barisan Sukarela Islam seperti *Hisbullah* (Tentara Allah), *Kagutotai* (Barisan Pelajar Sekolah Menengah), *Fujinkai* (Barisan Wanita), dan yang lain-lainnya (Kasupardi & Sudrajat, 2014:145). Pada tahap berikutnya, untuk membatu pasukan yang berada di garis depan, pada awal tahun 1944, dibentuk organisasi sosial baru yang dikoordinir oleh pemerintah Desa. Organisasi tersebut disebut *Tonarigumi* atau RT (Rukun Tetangga), yang rata-rata terdiri atas 25 *umpi* atau keluarga (Benda, 1980; Suwirta, 1989; dan Hardjasaputra, 1997).

*Tonarigumi* tersebut dipimpin oleh seorang *Kumico*, yang berasal dari warga setempat. *Kumico* dibantu oleh seorang Sekretaris, Bendahara, dan tiga orang Ketua Seksi yang terdiri dari Seksi Keamanan, Seksi Kewanitaan, dan Seksi Kesehatan. Di samping itu, terdapat juga beberapa Penasihat. Selain *Tonarigumi*, pada level atasnya dibentuk *Azajokai* (Rukun Kampung) yang dipimpin oleh *Azaco* (Kepala Kampung), yang terbentuk di setiap Kota Kabupaten, termasuk Kota Purwakarta tentunya. Kemudian, di setiap Desa dibentuk Rukun *Somah*, yang terdiri dari 5-20 *Somah* (Keluarga). Himpunan Ketua-ketua Rukun *Somah* tersebut disebut Rukun Desa (Benda, 1980; dan Hardjasaputra, 1997).

Peristiwa di Purwakarta, berupa konflik antara pihak pribumi dengan tentara Jepang, terutama terjadi pada awal revolusi kemerdekaan Indonesia. Dengan dijadikannya Purwakarta sebagai pusat-pusat pelatihan semacam pasukan PETA, dan munculnya berbagai organisasi kemiliteran dan organisasi pendukung lainnya, maka Purwakarta menjadi punya kesempatan untuk ikut melakukan perjuangan melawan penjajah Jepang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Purwakarta kemudian dikenali sebagai salah satu daerah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa fakta sejarah yang memperlihatkan bahwa pada zaman revolusi kemerdekaan Indonesia,

Purwakarta menjadi basis perjuangan, antara lain ditunjukkan oleh hal-hal sebagai berikut (*cf* Nasution, 1978; Hardjasaputra, 1980; dan Hardjasaputra, 1997).

*Pertama*, setelah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia diketahui oleh masyarakat Purwakarta, sejumlah rakyat dengan dimotori oleh para pemuda pejuang melucuti senjata tentara Jepang, yakni *Rikugun* (Angkatan Darat) yang berada di Purwakarta dan Wanayasa. Pasar Jumat dijadikan tempat rapat oleh KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) Purwakarta untuk melakukan perebutan senjata dari tentara Jepang.

*Kedua*, pada tanggal 25 Agustus 1945, BKR (Badan Keamanan Rakyat) Purwakarta terbentuk dan bermarkas di Gedong Kembar Utara di Purwakarta.

*Ketiga*, setelah BKR berubah menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat), pada tanggal 5 Oktober 1945, Purwakarta menjadi tempat kedudukan Resimen VI TKR dan Brigade III/Kiansantang. Pada tanggal 25 Januari 1946, TKR kemudian berubah menjadi TRI (Tentara Rakyat Indonesia).

*Keempat*, pada tanggal 3 Juni 1947, TRI berubah lagi menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia). Plered di Purwakarta menjadi Pos Komando Resimen TNI, dan Padalarang di dekat Bandung menjadi sektor pertahanan Resimen 7.

*Kelima*, ketika tentara Belanda melancarkan Agresi Militer I, mulai 21 Juli 1947, pasukan Belanda menyerang tempat-tempat kedudukan TNI, antara lain Purwakarta, dan terjadi pertempuran yang hebat di daerah tersebut.

*Keenam*, dalam menghadapi Agresi Militer Belanda II, yang dimulai 19 Desember 1948, Purwakarta juga menjadi tempat kedudukan TNI Batalyon Sentot Iskandardinata dari pasukan Divisi Siliwangi.

Pada bagian akhir revolusi kemerdekaan Indonesia, pemerintah Negara Pasundan, yang berada di lingkungan RIS (Republik Indonesia Serikat), menjadikan Purwakarta sebagai Kabupaten dengan ibukota Subang (*cf* Haryono *et al.*, 1971; dan Pansuslitrahkab Subang, 1980). Setelah RIS bubar pada

tanggal 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Kemudian, pemerintah RI (Republik Indonesia) mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, yang menetapkan dan mengukuhkan Provinsi Jawa Barat, berikut Kabupaten-kabupaten yang di bawahnya. Bab I Pasal 1 dalam Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa Purwakarta sebagai Kabupaten di lingkungan pemerintah RI (Mashudi & Djajasoempena, 1970; dan Pemprov Jabar, 1993).

Peristiwa-pristiwa tersebut di atas seyogyanya diketahui oleh masyarakat Purwakarta, agar mereka makin mencintai daerahnya. Dengan demikian akan makin diketahui potensi sosial yang ada dalam kehidupan masyarakat, baik di lingkungan kota maupun di kawasan pedesaan.

## KESIMPULAN <sup>5</sup>

Uraian tersebut, meskipun secara garis besar, menunjukkan bahwa di Purwakarta cukup banyak peristiwa sejarah, berikut peninggalannya. Peristiwa-peristiwa itu berkaitan dengan masalah sosial dan budaya. Peninggalan-peninggalan sejarah itu pula, terutama yang berupa benda (bangunan, tempat, dan benda lain), perlu dilestarikan. Pada satu sisi, hal itu dimaksudkan agar generasi sekarang dan yang akan datang memiliki pengetahuan dan kebanggaan akan nilai-nilai historis (fungsi edukatif sejarah) daerah tersebut.

Pada sisi lain, peninggalan-peninggalan sejarah itu memiliki signifikansi, antara lain sebagai asset yang dapat dikelola oleh Pemda (Pemerintah Daerah) setempat, sehingga dapat dijadikan sebagai sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah), misalnya melalui sektor pariwisata, seperti halnya yang dilakukan oleh negara maju di Asia (Jepang dan Korea Selatan), yang mengembangkannya menjadi semacam

*Socio-Historical and Cultural Park*.

Berdasarkan potensi yang dimilikinya, yakni potensi sejarah, potensi budaya, dan potensi alam – terutama tempat-tempat dan bangunan yang berarsitektur megah, dengan panorama indah, ditambah dengan potensi sumber daya manusianya – Purwakarta telah menjadi sebuah wilayah yang memiliki energi cukup berlimpah di dalam mengembangkan daerahnya, dengan motto “*wibawa karta raharja*”.

Saat ini, sebagai Kabupaten yang usianya genap 66 tahun, Purwakarta dikenal sebagai Kabupaten dengan ikon budaya, antara lain melalui Perda (Peraturan Daerah) Desa Berbudaya dan SK (Surat Keputusan) Bupati yang menetapkan Kawasan Pedesaan Berbasis Budaya, memastikan Kabupaten Purwakarta sebagai daerah yang menjadikan budaya sebagai dasar untuk membangun wilayahnya, di bawah pimpinan Bupati Dedi Mulyadi. Kondisi ini tentu saja tidak bisa dilepaskan dari aspek historis Purwakarta, yang pernah menjadi bagian dari Kabupaten Karawang, dengan posisi sebagai ibu kota.<sup>6</sup>

## Referensi

- Anwar, M.S. [ed]. (2015). *Spirit Budaya Kang Dedi*. Jakarta: Media Indonesia Publishing.
- Benda, Harry J. (1980). *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang, 1942-1945*. Jakarta: Pustaka Jaya, Terjemahan.
- Bratakusumah, R. Moch Affandi. (1986). *Sejarah Purwakarta*. Purwakarta: Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Purwakarta.
- Hardjasaputra, A. Sobana. (1980). *Pemerintahan Daerah Jawa Barat pada Masa Revolusi Fisik (September 1945 – Juni 1948)*. Bandung: Fakultas Sastra UNPAD [Universitas Padjadjaran].
- Hardjasaputra, A. Sobana. (1997). *Jawa Barat pada Masa Pendudukan Jepang*. Bandung: Lembaga Penelitian UNPAD [Universitas Padjadjaran] Bandung.
- Hardjasaputra, A. Sobana [ed]. (2004). *Inventarisasi Data Bangunan Bersejarah dan Toponimi*. Bandung: Dinas Pariwisata Kota Bandung dan Yayasan Kebudayaan Purbatisti.
- Hardjasaputra, A. Sobana. (2005). *Nilai Benda Cagar Budaya dan Peranan Baing Yusuf di Purwakarta*.

<sup>5</sup>*Sebuah Pengakuan:* Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada Prof. Dr. Sobana Hardjasputra, M.A., yang telah memberi semangat dan membantu saya dalam menyelesaikan tulisan ini; sekaligus juga beliau menjadi promotor saya ketika menyelesaikan Program S-3 (Doktor) di UNPAD (Universitas Padjadjaran) Bandung. Walau bagaimanapun, seluruh isi dan interpretasi dalam tulisan ini tetap menjadi tanggung jawab akademik saya sendiri.

<sup>6</sup>*Pernyataan:* Saya, dengan ini, menyatakan bahwa makalah penelitian saya ini bersifat original, bukan hasil plagiat, dan belum pernah atau tidak sedang diajukan pada redaksi jurnal nasional lain. Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

- Purwakarta: Dinas Kabudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purwakarta.
- Hardjasaputra, A. Sobana. (2007). "Peninggalan Sejarah di Purwakarta: Maknanya bagi Jatidiri Masyarakat". *Makalah* disajikan dalam Seminar Sejarah tentang Peninggalan Sejarah sebagai Objek Wisata di Kabupaten Purwakarta di Bandung, pada tanggal 26 Juni.
- Hardjasaputra, A. Sobana [ed]. (2008). *Sejarah Purwakarta*. Purwakarta: Badan Pariwisata dan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.
- Haryono, Nono et al. (1971). *Kabupaten Subang: Latar Belakang Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Subang: Pemdakab [Pemerintah Daerah Kabupaten] Subang.
- Ilyas, Aries Effendi. (1987). "Lahir dan Perkembangan Kota Purwakarta sampai Menjadi Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta (1830-1968)". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Bandung: Fakultas Sastra UNPAD [Universitas Padjadjaran] Bandung.
- Kasupardi, Endang & Undang Sudrajat. (2014). *Cing Caringcing Pageuh Kancing, Set Saringset Pageuh Iket: Buah Pemikiran Kang Dedi Mulyadi*. Purwakarta: CV Trinanda.
- Kern, R.A. (1898). *Geschiedenis der Preanger-Regentschappen: Kort Overzicht*. Bandoeng: De Vries & Fabricius.
- Kuntowijoyo. (2001). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jogjakarta: Yayasan Bentang Budaya.
- Kuntowijoyo. (2009). *Penjelasan Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- Kutoyo, Sutrisno [ed]. (1986). *Sejarah Pendidikan Daerah Jawa Barat*. Bandung: Proyek IDKD Depdikbud RI [Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia].
- Makna "Karta" dalam online di: <https://id.wikipedia.org/wiki/-karta> [diakses di Bandung, Indonesia: 25 Agustus 2016].
- Mashudi & Nana Djajasoempena. (1970). *Perkembangan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Djawa Barat (1945 - 1960)*, Djilid 2. Bandung: t.p. [tanpa penerbit].
- Nasution, A.H. (1978). *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Bandung: Disjarah AD [Dinas Sejarah Angkatan Darat] dan Penerbit Angkasa, cetakan pertama.
- Natanagara, R.H. Husen & R. Prawiradinata. (t.th.). *Sajarah Karawang*. Karawang: Pemdakab [Pemerintah Daerah Kabupaten] Karawang.
- Padilla, A.M. (1980). "The Role of Cultural Awareness and Ethnic Loyalty in Acculturation" dalam A.M. Padilla [ed]. *Acculturation Theory, Models, and Some New Findings*. Boulder, CO: Westview Press.
- Pansuslitrahkab [Panitia Khusus Peneliti Sejarah Kabupaten] Subang. (1980). *5 April 1948 Hari Jadi Kabupaten Subang dengan Latar Belakang Sejarahnya*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Pemprov Jabar [Pemerintah Provinsi Jawa Barat]. (1993). *Sejarah Pemerintahan di Jawa Barat*. Bandung: Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I.
- Prastowo, Yustinus et al. (2014). *Ketimpangan Pembangunan Indonesia dari Berbagai Aspek*. Jakarta: Penerbit Infid. Tersedia secara online juga di: <http://infid.org/wp-content/uploads/2015/11/Buku-Ketimpangan-Pembangunan-Indonesia.pdf> [diakses di Bandung, Indonesia: 25 Agustus 2016].
- Santoso, Budi & Irma Winingsih. (2013). "Intergrasi Multikultural dalam Masyarakat Multietnis: Strategi Akulturasi Budaya Masyarakat Etnis Jawa, Cina, dan Arab Keturunan di Wilayah Semarang". Tersedia secara online di: [http://dinus.ac.id/wbcs/assets/dokumen/penelitian/Lap\\_Kemajuan/laporanKemajuan\\_0627057602\\_.pdf](http://dinus.ac.id/wbcs/assets/dokumen/penelitian/Lap_Kemajuan/laporanKemajuan_0627057602_.pdf) [diakses di Bandung, Indonesia: 25 Agustus 2016].
- Sewaka. (1955). *Tjorat-tjaret dari Djaman ke Djaman*. Bandung: Penerbit Visser.
- Sjamsuddin, Helius. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Sumantapura, Djunaedi A. (1999). *Sejarah Purwakarta (1633 - 1942): Dari Karawang ke Purwakarta Lewat Wanayasa*. Purwakarta: DHC [Dewan Harian Cabang] Angkatan 45 Kabupaten Purwakarta.
- Sumantapura, Djunaedi A. (2002). *Hari Jadi Purwakarta: Dari Karawang ke Purwakarta Lewat Wanayasa*. Purwakarta: t.p. [tanpa penerbit].
- Suwirta, Andi. (1989). "Sikap Politik Pemerintahan Pendudukan Jepang terhadap Umat Islam Indonesia, 1942-1945". *Skripsi Sarjana Tidak Diterbitkan*. Bandung: Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP [Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan] Bandung.
- Walsh, W.H. (1970). *An Introduction to Philosophy of History*. London: Hutchinson University Library.
- Wawancara dengan Sobana Hardjasaputra, Sejarawan Senior dari UNPAD (Universitas Padjadjaran) Bandung dan sekarang mengajar di UNIGAL (Universitas Galuh) Ciamis, di Bandung, pada tanggal 3 Juli 2015.